



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KULON PROGO

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2018 disusun berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP yang disusun oleh Dinas PMD Dalduk dan KB dalam rangka memberikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan (*stakeholders*).

LKjIP Dinas PMD Dalduk dan KB ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 23 Januari 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Kepala


SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I; IV/b
NIP.197305121998031008

Ringkasan Eksekutif

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan misi daerah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Sehat, Berprestasi, Mandiri, Berkarakter dan Berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram

Mengacu visi misi daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : a.meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, b.meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat, c.meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
2. Sasaran: a.meningkatnya ketahanan keluarga, b.meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, c.meningkatnya kapasitas otonomi desa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, pogram dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2018 dapat dilihat pada diagram berikut :

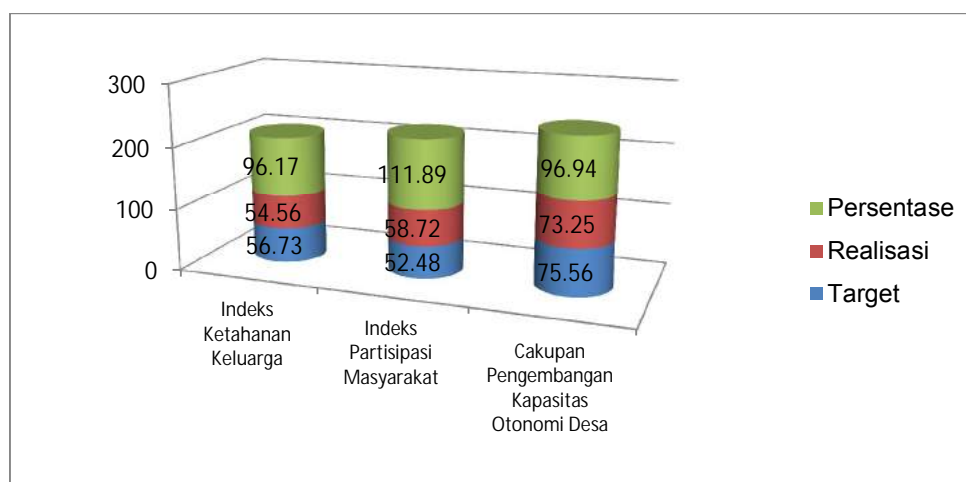


Diagram capaian kinerja
Dinas PMD DALDUK dan KB Tahun 2018

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.1.1 Tujuan	6
2.1.2 Sasaran	6
2.2 Penetapan Kinerja.....	6
2.2.1 Target Belanja Dinas PMD Dal duk dan KB	9
2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3 Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya Manusia	19
3.3.1 Akuntabilitas Anggaran	19
3.3.2 Akuntabilitas Sumber Daya Manusia	21
3.3.3 Akuntabilitas Sarana dan Prasarana	23
BAB IV. PENUTUP.....	24
Lampiran.....	25
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas PMD Dal duk dan KB KAB. KULON PROGO PERBUP NO : 58 tahun 2016	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 secara keseluruhan terdiri dari 37 PNS yang terdiri dari 17 pejabat struktural dan 20 staf.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa;
3. Melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk;
4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana; dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;
3. Melaksanakan kegiatan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas;

5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa
2. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

- c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi dan bimbingan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan pendapatan desa serta pengelolaan kekayaan desa.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintah desa;
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pendapatan desa;
3. Menyelenggarakan pengelolaan kekayaan desa; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi penyelenggaraan advokasi dan penyuluhan serta pengendalian penduduk dan informasi.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan advokasi dan penyuluhan;
2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

- e. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi penyelenggaraan jaminan dan kesertaan keluarga berencana serta ketahanan kesejahteraan keluarga.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan jaminan dan kesertaan Keluarga Berencana;
 2. Menyelenggarakan kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta tata kerja, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

1. **Kepala**
2. **Sekretariat terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :**
 - a. Seksi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sistem Informasi.
4. **Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :**
 - a. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa; dan
 - c. Seksi Administrasi Kekayaan Desa.
5. **Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :**
 - a. Seksi Advokasi dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi.
6. **Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :**
 - a. Seksi Jaminan dan Kesertaan Keluarga;
 - b. Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**
8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Dinas PMD Dalduk dan KB telah menyusun Renstra 2017 – 2022 dengan mengacu pada RPJMD 2017 – 2022 yang memuat visi misi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2017 – 2022 berikut target output dan outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut telah mencakup strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya ketahanan keluarga.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya kapasitas otonomi desa

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Dalduk dan KB secara umum yang meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Pelayanan KB terkendala topografis wilayah dan jumlah SDM di lini lapangan.
2. Peran kader dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL) PIK R dan UPPKS masih kurang.
3. Belum kuatnya jejaring program KKBPK.
4. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meningkat.
5. Pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih kurang.

Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Identifikasi isu – isu strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - Lain
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) yang dibentuk memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global, menuntut kesiapan SDM di masyarakat untuk menghadapi persaingan global	Angka Kemiskinan dan indeks ratio gini yang besar menjadi tantangan bagi upaya pengentasan kemiskinan	Program-program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
	Isu ketahanan keluarga yang makin menurun ditandai dengan tingginya angka perceraian,meningkatnya kasus kenakalan menjadi tantangan bagi upaya pembangunan keluarga	Komitmen pemda untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga dengan advokasi dan KIE melalui kelompok kelompok kegiatan	
	Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaan pemerintahan desa.	Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintah Desa, meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintah desa	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan misi daerah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Sehat, Berprestasi, Mandiri, Berkarakter dan Berbudaya
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram

Mengacu visi misi daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

2.1.2. Sasaran

1. Meningkatnya ketahanan keluarga.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatnya kapasitas otonomi desa.

Renstra 2017-2022 tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 dan telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Tahun 2017-2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	56,88	56,73	58,73	60,83	62,97	63,26
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	47,20	52,48	57,26	58,11	61,42	65,64
Meningkatnya kapasitas otonomi desa	Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	41,65	75,56	80,26	83,16	85,51	80,00

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.

Penetapan kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Program Dinas PMD Dalduk dan KB Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	Program	Anggaran
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	56,73	Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	2.456.636.600
			Advokasi dan Pengendalian Penduduk	1.088.909.600

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	52,48	Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	642.625.750
Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	75,56	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.744.589.675

**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas PMD Dal duk dan KB dihitung dengan formula sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Keluarga : ((partisipasi KB aktif/Jumlah PUS X 40%) + (Jumlah Keluarga yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB x 10 %) + (Jumlah Keluarga yang masuk kel BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR x 10 %)+(Jumlah Keluarga yang masuk kel BKL/Jumlah keluarga sasaran BKL x 10 %)+(Jumlah sekolah SLTP yang mendapat pendidikan kependudukan /Sekolah SLTP x 30 %).

- b. Indeks Partisipasi Masyarakat : $((\text{Jumlah swadaya masyarakat}/\text{jumlah dana program} \times 60\%) + ((\text{Jumlah PKK Aktif, LPMD Aktif}/ \text{Jumlah PKK dan LPMD} \times 40\%))$
- c. Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa : $((\text{jumlah Perdes APBDes yang ditetapkan tepat waktu}/\text{Jumlah Desa} \times 100\%) + (\text{jumlah realisasi penyerapan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi}/\text{jumlah ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \times 100\%) + (\text{jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa} \times 100\%) + (\text{jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa}/\text{jumlah jabatan apartur pemerintahan desa yang kosong} \times 100\%) + (\text{jumlah desa tertib aset}/\text{jumlah desa} \times 100\%))/5$

Hasil pengukuran indikator kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	%	56,73	54,56	96,17 %	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	%	52,48	58,72	111,89 %	
3.	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	%	75,56	73,25	96,94%	

Dari tabel 3.2, terdapat tiga sasaran strategis dengan tiga indikator sasaran strategis yang juga merupakan IKU Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan klasifikasi dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator kinerja sasaran strategis dalam klasifikasi sangat tinggi, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Keluarga dengan realisasi 96,17 % kurang dari target;
2. Indikator Indeks Partisipasi Masyarakat dengan realisasi 111,89 % melebihi dari target;
3. Indikator Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa dengan realisasi sebesar 96,94 kurang dari target;

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Tolak ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Ketahanan Keluarga) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Keluarga.

Tabel 3.3
Indeks Ketahanan Keluarga 2018

No	Indikator	Realisasi 2017	Tahun 2018		% Realisasi	Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi			
1.	Indeks Ketahanan Keluarga	53,69%	56,73%	54,56%	96,17%	63,26%	86,24%

Adapun Capaian Kinerja SKPD tahun 2018 (IKU SKPD) Indeks Ketahanan Keluarga sejumlah 54,56% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2018	Realisasi th. 2018
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	%	$((\text{Partisipasi KB aktif/jumlah PUS} \times 40\%) + (\text{jumlah keluarga yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB} \times 10\%) + (\text{Jumlah keluarga yang masuk kel BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR} \times 10\%)) / (\text{jumlah keluarga yang})$	56,73%	54,56%

			masuk kel BKL/jumlah keluarga sasaran BKLx10%)+(Jumlah sekolah SLTP yang mendapat pendidikan kependudukan/jumlah SLTPx30%)		
			Peserta KB Aktif	53.734	43.032
			PUS	67.988	60.359
			Jumlah Keluarga Anggota BKB	11.678	10.844
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKB	13.787	13.130
			Jumlah Keluarga Anggota BKR	4.458	4.193
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKR	5.344	4.872
			Jumlah Keluarga anggota BKL	4.611	4.056
			Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan BKL	5.554	5.021
			Jumlah Sekolah SLTP yang mendapat pendidikan kependudukan	0	3
			Jumlah Sekolah SLTP	82	82

Capaian kinerja 2018 untuk indikator Indeks Ketahanan Keluarga menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (96,17%). Kondisi ini juga telah menyumbang sebanyak 86,2 4% dari target pada akhir RPJMD. Dibandingkan capaian tahun 2017 telah meningkat sebanyak 1,37%. Kesertaan KB Aktif sebanyak 71,29% telah menyumbang 40% Indeks Ketahanan Keluarga sedangkan 60% lainnya dicapai oleh pembinaan keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga dan pendidikan kependudukan di tingkat sekolah. Capaian peserta KB aktif target dan angka unmeet ned turun menjadi 10,25%. Sedangkan pembinaan keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga masih belum optimal. Pertumbuhan kelompok bina keluarga balita dan keluarga lansia masih jauh dibawah target. Artinya jumlah keluarga yang ditarget untuk menjadi

anggota kelompok bina keluarga balita atau lansia masih belum sesuai target yang ditetapkan.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam indeks ketahanan keluarga, pembinaan keluarga melalui kelompok bina keluarga masih belum optimal hal ini disebabkan antara lain :

- a) Pengelolaan kelompok BKB kurang inovatif dan tidak berkembang sehingga kurang menarik bagi anggota kelompok. Hal itu dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana dan kemampuan pengelola kelompok yang kurang.
- b) Potensi keluarga yang menjadi sasaran anggota Bina Keluarga lansia tinggi namun karena keterbatasan SDM pengelolanya maka masih kurang bisa menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota .

b. Solusi

- a) Meningkatkan kemampuan kader kelompok Bina Keluarga Balita melalui pelatihan dan sosialisasi. Memberikan sarana dan prasarana KIE berupa leaflet dan modul. Khusus desa stunting akan diberikan sarana APE untuk BKB kit di tahun 2019.
- b) Meningkatkan kemampuan kader kelompok Bina Keluarga Lanisa Balita melalui pelatihan dan sosialisasi. Memberikan sarana dan prasarana KIE berupa leaflet dan modul

3.2.2 Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Indeks Partisipasi Masyarakat.

Tabel 3.4
Indeks Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Realisasi 2017	Tahun 2018		% Realisasi	Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi			
1.	Indeks Partisipasi Masyarakat	47,01%	52,48%	58,72%	111,89%	65,64%	89,45%

Capaian 2018 sesuai data dasar RPJMD 2017-2022

Adapun target Capaian Kinerja SKPD tahun 2018 (IKU SKPD) Indeks Partisipasi Masyarakat sejumlah 52,48% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2018	Realisasi th. 2018
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	%	((Jumlah swadaya masyarakat/Jumlah Dana Program x 60%)+(Jumlah PKK Aktif, LPMD aktif/Jumlah PKK dan LPMD x 40%)	52,48%	58,72%
			Jumlah swadaya masyarakat	465.000.000	385.882.750
			Jumlah dana bantuan sosial yang disalurkan	1.350.000.000	1.015.000.000
			Jumlah PKK Aktif, LPMD Aktif	140	158
			Jumlah PKK dan LPMD	176	176

Capaian kinerja 2018 untuk Indeks Partisipasi Masyarakat menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (111,89%). Capaian kinerja tahun 2018 ini menyumbang sebanyak (89,45%) dari target akhir RPJMD 2022. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 realisasi capaian tahun 2018 melonjak sangat tinggi dengan kenaikan prosentase 17,84 % yaitu dari 71,61% menjadi 89,45 %. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pengembangan TTG, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa, Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa. Kegiatan yang melebihi target capaiannya adalah kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dimana target LPMD aktif tercapai 70 dari target 52 LPMD.

Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indeks partisipasi masyarakat adalah :
 - a) Swadaya masyarakat yang belum dilaporkan sejatinya masih banyak karena masyarakat tidak dapat menilai swadaya yang berujud jasa (tenaga) maupun barang yang sudah tersedia bukan dari toko.
- b. Solusi
 - a) Menertibkan laporan penyelenggaraan pembangunan di masyarakat.

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa

Tolak ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa.

Tabel 3.5
Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

No	Indikator	Realisasi 2017	Tahun 2018		% Realisasi	Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi			
1.	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	38,35%	75,56%	73,25%	96,94%	80,00%	91,56%

Capaian 2018 sesuai data dasar RPJMD 2017-2022

Adapun target Capaian Kinerja SKPD tahun 2018 (IKU SKPD) Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa sejumlah 73,25% didapat dari perhitungan sebagai berikut :

Sasaran SKPD	IKU SKPD	Satuan	Cara Perhitungan	Target th. 2018	Realisasi th. 2018
Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	%	((Jumlah APBDes yang ditetapkan tepat waktu/jumlah Desa x 100%)+(jumlah realisasi penyerapan ADD,DD,Bagi hasil Pajak, dan retribusi/jumlah ADD,DD,Bagi hasil pajak, dan retribusi x 100%)+(jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa/jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa x 100%)+(jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa/jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong x 100%)+(jumlah Desa tertib asset/jumlah Desa x 100%))/5	75,56%	73,25%
			Jumlah Perdes APBDes yang disampaikan tepat waktu (7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan)	87	87
			Jumlah Perdes APBDes	87	87
			Jumlah Perdes RKPDes yang disampaikan tepat waktu (7 hari setelah tanggal ditetapkan)	87	21
			Jumlah Perdes RKPDes	87	87
			Jumlah realisasi penyerapan ADD, DD, Pajak dan Retribusi	124.537.500.000	140.336.716.792

			Jumlah ADD, DD, Pajak, Retribusi	166.050.000 .000	156.636.901. 000
			Jumlah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	16	13
			Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	16	13
			Jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan desa	59	55
			Jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong	78	59
			Jumlah desa tertib asset	35	35
			Jumlah desa	87	87

Capaian kinerja 2018 untuk indikator Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang baik (96,94%). Capaian kinerja tahun 2018 ini menyumbang sebanyak (91,56 %) dari target akhir RPJMD 2022. Meskipun belum mencapai target namun bila dibandingkan dengan tahun 2017, capaian ini sudah meningkat sangat tinggi. Pada tahun 2018 target pengumpulan Perdes APBDDes tepat waktu telah dapat dicapai 100 % sedangkan untuk Perdes RKPDes masih belum dapat dicapai dengan baik. Namun begitu secara keseluruhan capaian indikator tahun 2018 sangat tinggi.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa, Pendampingan Pemilihan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD, Pembinaan Tata Pemerintahan Desa, Pembinaan Pengelolaan Asset Desa, Pembinaan Administrasi Desa.

Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam capaian peningkatan kapasitas ekonomi desa adalah :
 - a) Penyampaian Perdes tentang RKPDes kepada Bupati dan Perdes tentang APBDDes belum tepat waktu. Kendala penyusunan perencanaan pembangunan desa (RKP Desa) tidak bisa tepat waktu dikarenakan ketidaktaatan pemerintah desa terhadap siklus

kegiatan tahunan desa. Hal lain yang juga menjadi keterlambatan penyusunan RKP Desa adalah adanya Permendagri No 20 tahun 2018 yang diundangkan dan segera dilaksanakan mengakibatkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap RKP Desa yang telah disusun. Selain itu adanya SHBJ yang baru untuk menyusun RAB mengakibatkan Rancangan RKP Desa disesuaikan lagi. Di sebagian besar pemerintah desa sumber daya manusia (SDM) untuk membuat RAB sangat terbatas sehingga mengakibatkan penyusunan RKP Desa juga semakin terlambat.

- b) Pengelolaan keuangan desa masih kurang optimal dengan serapan anggaran yang masih dibawah 90%. Ini dikarenakan kemampuan perangkat desa sebagian besar masih kurang.

b. Solusi

- a) Meningkatkan kapasitas/pemahaman aparatur desa dalam perencanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

3.3.1. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 sebesar Rp. 10.086.165.063,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.913.405.563,- atau 28,88% dan belanja langsung sebesar Rp. 7.172.759.500,- atau 71,11%.

Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 6.896.892.222,- dari total anggaran Rp. 7.172.759.500,- atau sebesar 96,15% yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja langsung pendukung sebesar Rp. 1.120.773.627,- Dari Rp. 1.239.997.875,- atau 90,38% dan realisasi Total belanja utama sebesar Rp. 5.776.118.595,- dari Rp. 5.932.761.625,- Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya ketahanan keluarga 99,35%, Utamanya untuk Advokasi dan KIE

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pendataan Keluarga dan Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga sejahtera. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada cakupan Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Desa sebesar 93,65%, Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Capaian	Realisasi		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	56,73	54,56	96,17 %	1. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	2.456.636.600	2.437.464.287	99,22 %
						2. Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	1.088.909.600	1.085.020.050	99,64 %
					96,17 %		3.545.546.200	3.522.484.337	99,35 %
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	52,48	58,72	111,89 %	Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	642.625.750	619.892.211	96,46 %
3	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	75,56	73,25	96,94 %	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.744.589.675	1.633.742.047	93,65 %
Total Belanja Utama							5.932.761.625,00	5.776.118.595,00	97,36 %
Belanja Langsung Pendukung							1.239.997.875,00	1.120.773.627,00	90,38 %
Total Belanja Langsung							7.172.759.500,00	6.896.892.222,00	96,15 %

Pada tabel 3.6 dapat dilihat gambaran realisasi kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya ketahanan keluarga, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sasaran tercapai sebesar 96,17 % disertai penyerapan anggaran mencapai 99,35%. Melihat penyerapan anggaran sebesar 99,35 % apabila dibandingkan dengan capaian sasaran kinerja meningkatnya ketahanan keluarga sebesar 96,17 %, maka pemanfaatan anggaran dapat dikatakan kurang efisien (input > output dan outcome)
2. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) tercapai sebesar 111,89 % disertai penyerapan anggaran mencapai 96,46 %. Penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian sasaran kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 111,89 % maka penyerapan anggaran dapat dikatakan efisien.
3. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas otonomi desa, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) tercapai sebesar 96,94% disertai penyerapan anggaran sebesar 93,65 %. Dibandingkan dengan realisasi capaian sasaran kinerja sebesar 96,94 % dengan realisasi anggaran maka pemanfaatan anggaran dapat dikatakan kurang efisien (input > output dan outcome)

3.3.2. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 orang yang terinci berdasarkan kriteria yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Data Pegawai Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo Menurut Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2018

No	Struktur Organisasi	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Yang Terisi	Kekuangan
1	Kepala	1	1	0
2	Sekretariat	20	11	9
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12	6	6

4	Bidang Pemerintahan Desa	16	8	8
5	Bidang Pengendalian Penduduk	10	5	5
6	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12	4	8
7	Jabatan Fungsional Tertentu	5	2	3
Jumlah		76	37	39

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Dalduk dan KB

Ketersediaan SDM di Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 2018 sebesar 48,68 % dari kebutuhan atau terisi 37 dari kebutuhan sebesar 76. Untuk mengisi kekurangan SDM digunakan tenaga kontrak untuk administrasi kegiatan sebanyak 6 orang. Dengan capaian kinerja diatas 90 % dengan SDM yang sangat terbatas merupakan capain kinerja yang sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang diampu oleh Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan perwujudan jajaran Dinas PMD Dalduk dan KB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Secara umum sasaran-sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan sangat baik. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Keluarga tercapai 54,56% (96,17%) dari target 56,73%
2. Indeks Partisipasi Masyarakat tercapai 58,72% (111,89%) dari target 52,48%
3. Cakupan Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa tercapai 73,25% (96,94%) dari target 75,56%

Hal tersebut diatas dapat dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, serta kerja keras seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

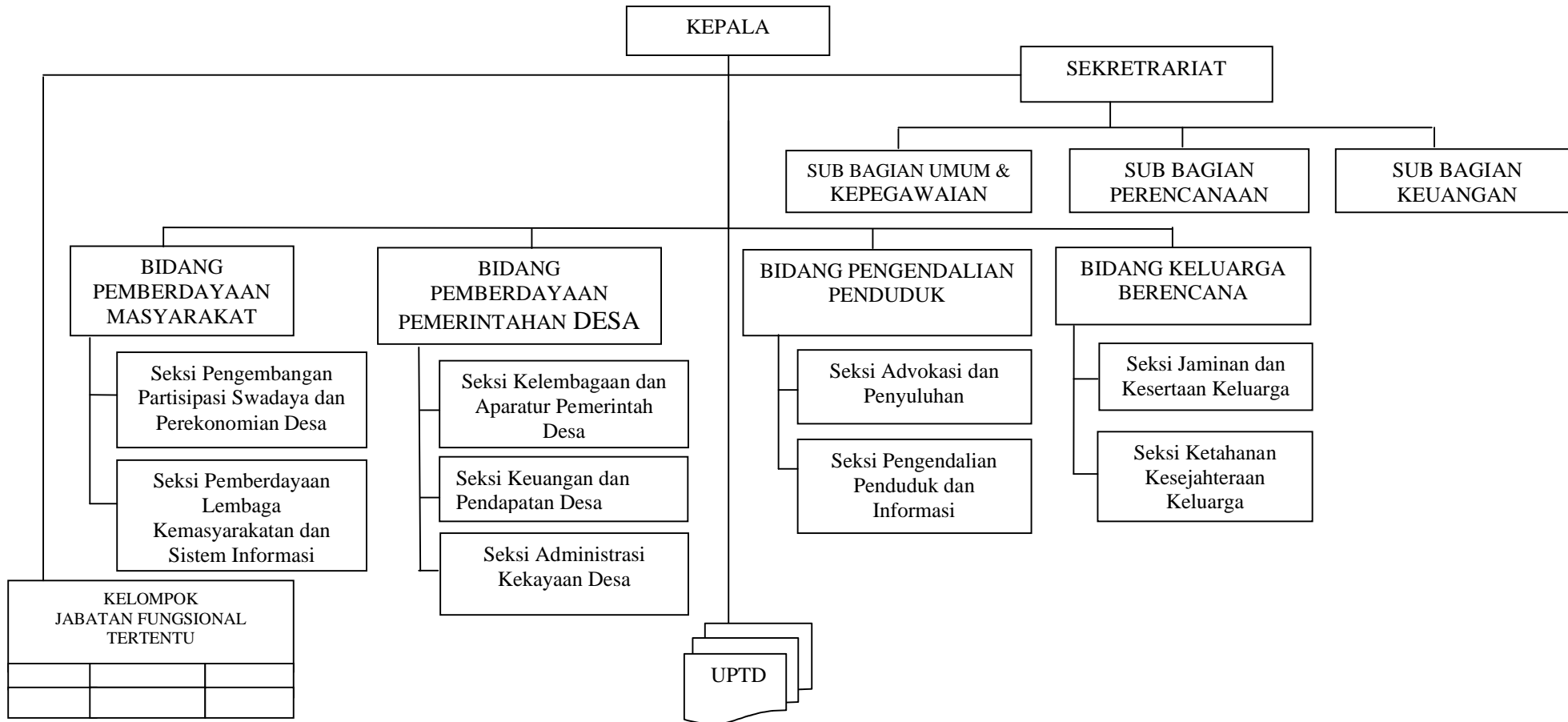
Wates, 23 Januari 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Kepala


SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I; IV/b
NIP.197305121998031008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas PMD Dalduk dan KB KABUPATEN KULON PROGO
 PERBUP NO : 58 tahun 2016





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMANTO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr.H.HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)
Jabatan : BUPATI KULON PROGO

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bupati Kulon Progo
dr.H.HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)


Pihak Pertama
SUDARMANTO, S.IP, M.Si
NIK 19730512 199803 1 008



PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Partisipasi Masyarakat	Prosen	52,48
2	Meningkatnya Kapasitas Otonomi Desa	Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	Prosen	75,56
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Prosen	56,73

No	Program	Anggaran
1	Program Penguatan Kelembagaan dan peningkatan Partisipasi Masyarakat	642.625.750
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.744.589.675
3	Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga	2.456.636.600
4	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	1.088.909.600
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.025.300
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	25.330.600
7	Program Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	898.641.975
	Jumlah	7.172.759.500

 Bupati Kulon Progo
 dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kulon Progo


 SUDARMANTO, S.IP, M.Si
 Pembina Tk.I, IV/b
 NIP: 19730512 199803 1 008